

Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Bencana Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng

Maesaroh¹, Suwarno²

^{1,2}Pendidikan IPS, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v6i.447](https://doi.org/10.30595/pssh.v6i.447)

Submitted:

June 12, 2022

Accepted:

July 15, 2022

Published:

July 28, 2022

Keywords:

Community Empowerment; Disas
Management; Dieng Plateau
Tourism Area

ABSTRACT

The tourist area of the Dieng Plateau is located in the province of Central Java, precisely in the Wonosobo and Banjarnegara regencies which have geological, historical and agricultural characteristics that are considered distinctive. This plain is flanked by a range of hills on its north and south sides, originating from the same volcanic activity and is called the Dieng Mountains. The Dieng Mountains are geographically located between the Rogojembangan Peak complex in the west and the pair of Mount Sindoro and Mount Sumbing on the east side. Dieng is located at 1,600 to 2,100 m above sea level, with the direction of surface flow to the southwest, towards the Serayu River valley. The air temperature ranges from 12-20 °C during the day and 6-10 °C at night, during the dry season (July-August), the temperature reaches 0 °C in the morning. DT Dieng has a subtropical climate and produces frost or bun upas ("poison dew") because it causes damage to agricultural crops. This tourist area is a strategic area with a protected function that has very high tourism potential, both natural tourism, in the form of: natural scenery, waterfalls and lakes of color, as well as cultural tourism in the form of ancient sites (Hindu Temple Complex) and cultural attractions. This study aims to determine how the efforts and stages of community empowerment through DT Dieng tourism objects. This study uses three methods of data collection, namely interviews, observation and documentation. The economy is one of the important factors that affect the vulnerability of the community after the disaster. This study aims to determine the factors that are of interest to the community through community empowerment programs in disaster-affected areas and the implementation of programs towards village disaster resilience. The method used is a combination of quantitative and qualitative with questionnaires and in-depth interviews. The results showed that public awareness of the importance of disaster management as an increase in disaster preparedness. Participation of rural communities in tourist areas to help reduce the impact of disaster risks associated with the environment around settlements, can be encouraged by establishing disaster-resilient villages managed by the community themselves with full support. from the government.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Maesaroh,

Program Studi Pendidikan IPS,

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dusun III, Dukuhwaluh, Kec. Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53182

Email: maesaroh91@guru.smp.belajar.id

1. PENDAHULUAN

Kepariwisataan meliputi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan wisata, pengusaha, objek dan daya tarik wisata, serta usaha lain yang terkait. Pembangunan kepariwisataan pada hakekatnya merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik wisata, yang terwujud antara lain dalam bentuk keindahan alam, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan budaya, serta peninggalan sejarah dan purbakala. Pariwisata berkembang menjadi industri pariwisata yang melibatkan kepentingan berbagai pihak bahkan antar daerah atau antar negara. Pariwisata berpengaruh luas secara ekonomi dan sosial budaya. Kepariwisataan juga berdimensi politik, pertahanan dan keamanan, melibatkan seluruh lapisan masyarakat sehingga memerlukan koordinasi berbagai sektor baik secara lokal, regional, dan ruang lingkup nasional. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan perlu dilakukan secara terpadu antara berbagai komponen yang menentukan dan menunjang keberhasilannya [1].

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sehingga diharapkan mampu menunjang pembangunan ekonomi. Pengembangan pariwisata merupakan amanat UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan [2].

Kawasan Dieng Plateau merupakan salah satu kawasan terpenting di Indonesia yang berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem di Pulau Jawa. Namun saat ini kondisi kawasan sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan dunia internasional. Makalah ini berupaya membahas tentang pentingnya peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan.

Permasalahan pada kawasan hutan negara di Dieng yaitu berkurangnya luas hutan negara, hal ini terjadi akibat adanya penjarahan hutan, penebangan pohon, penyerobotan lahan/okupasi hutan untuk komoditas tanaman kentang dan pihak masyarakat dan pemerintah setempat yang masih kurang memperhatikan pentingnya kelestarian alam. Selain hal-hal tersebut yang perlu menjadi perhatian adalah belum adanya zonasi kondisi kawasan hutan negara sehingga pengelolaan kawasan hutan belum terarah (Puspita, 2005).

Kawasan Dieng tampak seperti puncak gunung yang patah sehingga menyisakan dataran dengan banyak kawah. Itulah sebabnya Dieng dinamai juga dengan dataran di atas pegunungan. Berdasarkan Geomorfologi dikatakan dataran adalah wilayah-wilayah dengan struktur yang relative horizontal. Dataran mempunyai relief rendah dengan lembah-lembah dangkal, sedangkan dataran tinggi mempunyai relief yang tinggi dengan lembah-lembah yang dalam [3].

Hingga saat itu, tanah Dieng sudah dikuras dengan monopoli tanaman yaitu kentang. Hampir 90 % tanah di Dieng ditanami kentang. Kentang merupakan tanaman yang oleh masyarakat Dieng dianggap sangat menjanjikan untuk mengangkat perekonomian masyarakat Dieng. Pola tumpang sari yang dapat mempertahankan keberagaman unsur hara tanah seakan telah dikesampingkan oleh masarakat Dieng, karena bisnis tanaman kentang di Dieng sangat menguntungkan, membuat harga tanah di sana sangat tinggi dan banyak peminatnya. Hal ini membuat oknum-oknum pejabat di sana lupa lingkungan sehingga pohon-pohon yang berada di pegunungan Dieng diubah menjadi ladang kentang. Dieng menjadi gundul dan dikhawatirkan akan terjadi longsor di saat musim hujan. dipegunungan Dieng diubah menjadi ladang kentang. Dieng menjadi gundul dan dikhawatirkan akan terjadi longsor di saat musim hujan.

Pembangunan yang dipahami sebagai proses perubahan di dalam kehidupan semestinya melibatkan masyarakat sebagai unsur yang tidak terpisahkan. Masyarakat sebaiknya tidak dipandang sebagai objek pembangunan semata. Adanya paradigma bottom up planning mengharapakan masyarakat dapat berperan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa wisata, dalam proses perencanaan harus sejak awal melibatkan masyarakat lokal. Dataran Tinggi Dieng sebagai objek wisata memiliki keragaman atraksi. Desa wisata dirancang oleh masyarakat setempat untuk melengkapi atraksi wisata di Dieng. Kajian ini menfokuskan pada proses partisipasi masyarakat kawasan Dataran Tinggi Dieng dalam membangun desa wisata di lingkungan tempat tinggal mereka [4].

Kawasan Dieng memiliki arti yang sangat penting ditinjau dari aspek ekologi, hidrologi, pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Kawasan Dieng tidak saja memiliki potensi hutan dataran rendah dan hutan pegunungan, tetapi juga merupakan salah satu daerah paling penting dalam mendukung kelangsungan hidup. Kebutuhan lahan pertanian di wilayah Dieng semakin tinggi dan hal itu yang kemudian memicu masyarakat melakukan perambahan hutan. Masalahnya, selain karena desakan ekonomi juga akibat kurang perhatian pemerintah terhadap kondisi hutan, instansi yang diberi konsensi menangani hutan. Tata guna lahan telah disalahgunakan karena masing-masing wilayah tidak digunakan sesuai peruntukan. Pemanfaatan daerah konservasi, tidak terawatnya daerah hutan produksi, pertanian di segala tempat dan penyedotan air tanpa pengelolaan telah mengakibatkan daerah ini sangat rawan bencana alam, selain juga menjurus ke arah proses pemiskinan bila pertanian tidak berkelanjutan ini tetap diteruskan. Selain itu sumber air bagi jutaan penduduk Jawa Tengah ini terancam kering bila pemerintah daerah dan lembaga pemerintah terkait serta penduduk setempat, baik di kabupaten Wonosobo dan kabupaten lain di sekeliling pegunungan Dieng tidak segera turun tangan untuk

menyelamatkan Dieng, agar tidak terjadi bencana alam luar biasa dan penduduk dapat hidup cukup dan aman secara berkelanjutan. Terdapat berbagai permasalahan menyangkut pengelolaan kawasan wisata oleh beberapa Pemda, misalnya permasalahan yang dihadapi di kawasan Dieng yang sangat kompleks. Tidak hanya masalah konservasi, tapi juga budaya, pariwisata, serta pertanian. Khusus di kabupaten Batang, penanganan kawasan Dieng ditangani oleh Bagian Lingkungan Hidup dan Produksi yang menitikberatkan pada aspek pelestarian lingkungan. Pelestarian yang menyangkut situs purbakala dikelola oleh berbagai instansi, seperti Kantor Kehutanan dan Perum Perhutani. Permasalahan yang berhubungan dengan situs purbakala perlu menggabungkan pula dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanian menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan agroekonomi. Kurangnya perawatan maupun pemeliharaan benda-benda maupun lingkungan di Dieng menyebabkan penurunan jumlah wisatawan karena kawasan tersebut sekarang menjadi gersang.

Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Dieng melalui model pemberdayaan masyarakat, berarti masyarakat setempat dilibatkan dalam upaya pengembangan Desa Wisata Dieng. Berdasarkan teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Suparjan dan Hempri Suyatno (2003), masyarakat diberikan kesempatan untuk membuka usaha di sekitar objek wisata, dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat agar lebih baik lagi. Menurut Suparjan dan Hempri Suyatno, konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Proses pemberdayaan pada dasarnya tidak sekedar mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek, namun didalamnya juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah yang menjadi fasilitator dalam hal pendanaan, mengharapkan masyarakat mampu untuk menggerakkan dan mengelola pengembangan Desa Wisata Dieng.

Peningkatan kapasitas masyarakat yang menetap di lokasi wisata yang rentan bencana perlu diperhatikan juga. Masyarakat awam dan pelaku wisata di Kawasan Dieng dapat diberikan pengetahuan dan ketangkasan sebagai proses pembelajaran sepanjang hayat agar mereka secara mandiri mampu mengatasi problem ekonomi, lingkungan, dan sosial di kawasan rentan bencana. Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas mendorong perlunya penerapan manajemen bencana dalam suatu destinasi pariwisata. Industri pariwisata yang dijalankan bukan saja harus berkelanjutan namun juga menjadi industri menjadi tangguh (*resilient*). Pada umumnya lokasi yang unik, menarik dan atraktif bagi para wisatawan justru berada di wilayah yang memiliki resiko bencana, seperti gunungapi, dataran tinggi, dan pantai. Pendekatan pengurangan resiko bencana sangat diperlukan mengingat resiko bencana dapat terjadi kapan dan dimana pun, termasuk di lokasi wisata. Manajemen resiko bencana adalah suatu proses yang terintegrasi guna meminimalkan kerugian/kehilangan dan memaksimalkan peluang dari kemunculan bencana/krisis yang memberikan pengaruh pada industri pariwisata secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam memberikan intervensi kepada masyarakat ataupun sekelompok organisasi tertentu mengenai pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang pengurangan resiko bencana dan mitigasi patut memperhatikan kondisi sosial budaya dan disesuaikan dengan kondisi local. Atas dasar inilah, peran perguruan tinggi untuk mendorong terjadinya proses transfer knowledge yang diharapkan mampu memberikan pemahaman sekaligus kesadaran bagi kelompok sasaran guna melakukan pengelolaan, perbaikan serta penyelamatan kehidupan manusia dan lingkungan, baik untuk masa kini dan masa mendatang. Pemberian pemahaman (knowledge) yang dilengkapi dengan pelatihan (action) dapat melalui pendidikan non-formal lewat pendekatan partisipatif guna menghasilkan dampak atas proses pembelajaran secara berkelanjutan. Urgensi pendidikan pengurangan resiko bencana dan mitigasi menjadi agenda strategis yang harus diberikan kepada kelompok masyarakat, ataupun masyarakat lebih luas yang tinggal dan menetap di daerah rawan bencana, dalam hal ini wilayah Dieng Plateau sebagai lokusnya. Terkait dengan upaya pengembangan destinasi pariwisata, isu terpenting yang patut diperhatikan adalah keberlanjutan destinasi yang secara konseptual diharapkan melahirkan pola-pola pengembangan pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Setidaknya terdapat empat kriteria penting pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan, yaitu: (1) pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, (2) pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, (3) pelestarian budaya bagi wisatawan dan masyarakat, serta (4) pelestarian lingkungan.

Masyarakat perlu diberikan bekal terkait mitigasi bencana. Kawasan wisata Dieng, sudah banyak tersedia fasilitas wisata yang perlu dilengkapi dengan infrastruktur tanggap bencana serta ditunjang kualitas SDM yang tanggap bencana. Kegiatan pariwisata juga merupakan kegiatan sosial budaya yang banyak melibatkan manusia di dalamnya sehingga wajar bila dalam pengembangan pariwisata unsur manusia menjadi sentral perhatian, baik menjadi subjek maupun menjadi objek. Dengan adanya pengembangan wisata diharapkan mampu memberikan daya saing terhadap daerah tujuan wisata lain. Kegiatan pembangunan pariwisata tidak lepas dari keadaan sosial, ekonomi dan lingkungan, oleh karena itu, pemanfaatan suatu lingkungan harus direncanakan secara matang dan dikendalikan secara terarah yaitu peran masyarakat. Perlibatan masyarakat dalam persiapan dan perencanaan pariwisata di daerahnya, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi mereka karena terdapat rasa kepemilikan serta tanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan yang sekaligus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang diharapkan untuk dicapai dari penelitian ini adalah: 1. Mengidentifikasi peran masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Dataran Tinggi

Dieng. 2. Identifikasi kekuatan dan kelemahan Desa Dataran Tinggi Dieng. 3. Identifikasi peluang dan ancaman Desa Wisata Dataran Tinggi Dieng. 4. Merumuskan Strategi pengembangan Desa Wisata Dataran Tinggi Dieng.

2. METODE PENELITIAN

Area yang dipilih adalah kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian mengenai “Pemberdayaan ekonomi masyarakat menuju desa tangguh bencana” yang bersifat kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam (In depth interview) dan alat bantu kuesioner untuk menggali data primer dari masyarakat. Wawancara sangat diperlukan untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang memerlukan jawaban penjelasan berupa proses (deskriptif) yang tidak terukur. Dengan demikian maka sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data Primer yang diperoleh secara langsung di lapangan, berupa :
 - a) Foto kondisi eksisting wilayah penelitian
 - b) Wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat;
 - c) kuesioner kepada masyarakat.
2. Data sekunder yang diperoleh di Kantor Kepala Desa, maupun buku dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. [5]

Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam kajian ini diperoleh dengan cara pengumpulan data sekunder dan kajian literatur untuk keperluan data sekunder, serta pengumpulan data primer untuk keperluan data primer. Teknik untuk mendapatkan data sekunder adalah dengan cara mempelajari dan mencatat dokumen kerja sama daerah, peraturan yang ada dan sebagainya, yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti untuk bahan menganalisa permasalahan. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk mendukung data primer yang telah diperoleh. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan faktor-faktor pendukung serta hambatannya. Dalam penelitian ini analisis kualitatif sendiri dilakukan berdasarkan hasil data dari wawancara, pengamatan dan observasi langsung, hasil gambar visual dan pemotretan, serta beberapa data-data instansional yang berkaitan dengan semua materi penelitian ini. Analisis kualitatif sendiri dapat bersifat:

- a. Deskriptif, yaitu menganalisis kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kerja sama kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, persepsi pemerintah kabupaten terhadap adanya kerja sama, faktor yang mendorong terjadinya kerja sama, faktor-faktor dukungan dan hambatan pemerintah kedua kabupaten terhadap kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng, serta format kelembagaan yang diinginkan oleh para pelaku (stakeholders).
- b. Komparatif, yaitu membandingkan hasil wawancara kedua kabupaten antara teori dan kenyataan di lapangan. Secara keseluruhan teknik analisis kualitatif untuk mengkaji dukungan dan hambatan kerja sama daerah pengelolaan dan pengembangan Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat diperlukan untuk membantu perekonomian masyarakat. Selain memberikan bantuan secara langsung, pemerintah pusat dan daerah dapat memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang dan secara mandiri dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah dapat memberikan bantuan serta pelatihan yang dapat mengasah dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Visi Pemberdayaan Masyarakat adalah meningkatkan kemandirian masyarakat. Misi Pemberdayaan Masyarakat adalah mengembangkan kemampuan dan kemandirian dan secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Kemandirian dalam konsep pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah tingkat kemajuan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat membangun dan memelihara kelangsungan hidupnya berdasarkan kekuatannya sendiri secara berkelanjutan, artinya untuk membangun bangsa yang mandiri dibutuhkan perekonomian yang mapan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang berasal dari kata ‘daya’ (*power*). Sedangkan pemberdayaan berasal dari kata ‘empower’ dimana dalam Merriam Webster dan Oxford English Dictionary menyatakan bahwa *power* mempunyai dua arti. Pertama, *power* berarti *to give power or authority* yang berarti ‘memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain’. Pengertian kedua adalah ‘*to give ability or to enable*’ yang bisa diartikan sebagai usaha untuk memberikan kemampuan atau pemberdayaan’. Oleh karenanya, sering sekali ide tentang pemberdayaan bersentuhan dengan ide kekuasaan, pengaruh dan kontrol. Pemberdayaan ditujukan bagi kemampuan seseorang, khususnya kelompok lemah dan rentan sehingga mereka punya kemampuan untuk (1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka mampu untuk terbebas dari kebutuhan dasar tersebut, (2) Menunjukkan sumber-sumber produktif yang memungkinkan

mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan, (3) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.[6]

Upaya pengembangan melalui model pemberdayaan masyarakat, berarti masyarakat setempat dilibatkan dalam upaya pengembangan Desa Wisata Talun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, masyarakat setempat juga dilibatkan dalam pengembangan Desa Wisata Talun. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuka usaha di sekitar objek wisata, dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat agar lebih baik lagi. Hal ini sejalan dengan teori pemberdayaan yang diungkapkan oleh Suparjan dan Hempri Suyatno (2003). Menurut Suparjan dan Hempri Suyatno, konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Proses pemberdayaan pada dasarnya tidak sekedar mengubah masyarakat dari objek menjadi subjek, namun didalamnya juga menyiratkan perubahan dari sisi pemerintah. Peran pemerintah yang menjadi fasilitator dalam hal pendanaan, mengharapkan masyarakat mampu untuk menggerakkan dan mengelola pengembangan Desa Wisata.

Penanggulangan bencana merupakan proses untuk mengurangi risiko yang diterima akibat bencana yang melanda di suatu daerah. Untuk mengurangi risiko tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Dalam rangka meningkatkan ketangguhan dan mengefektifkan proses penanggulangan bencana maka pemerintah pada tingkat terendah (pemerintah desa) harus mempunyai kemampuan dalam mengorganisir pengelolaan bencana yang ada di wilayahnya. Desa Wisata Dieng merupakan salah satu destinasi wisata andalan di Indonesia yang banyak menarik wisatawan baik lokal maupun manca Negara. Salah satu tujuan kedatangan wisatawan adalah untuk menikmati keunikan alam Desa Wisata Dieng dan sekitarnya. Keunikan alam Dieng merupakan berkah bagi masyarakat, akan tetapi di balik keindahan alam Dieng banyak menyimpan berbagai potensi ancaman bahaya yang setiap waktu dapat berubah menjadi bencana. Berdasarkan data historis, Kawasan Dieng setidaknya mempunyai tiga potensi bencana alam yaitu bencana gempa bumi, bencana tanah longsor, dan bencana gas beracun. Potensi bencana tersebut telah terbukti mempunyai dampak yang merugikan masyarakat di antaranya kerugian materiil, terganggunya aktivitas sehari-hari masyarakat bahkan hingga kerugian nyawa. Kegiatan pengurangan risiko bencana di daerah Wisata Dieng memerlukan sebuah perencanaan yang terstruktur agar setiap unsur pelaksana memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dokumen standar operasional prosedur memuat langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk mengurangi risiko bencana pada saat pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Selain itu, dokumen juga memuat alur koordinasi antar pelaksana agar tidak terjadi tumpang susun pengambilan keputusan.

Dalam pengembangan Desa Wisata ini, model pemberdayaan yang digunakan adalah enabling, empowering, dan protecting. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) dilakukan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat melalui pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membuka usaha pada lokasi objek wisata. Selanjutnya, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) dengan memberikan pelatihan – pelatihan dari dinas untuk mengolah ikan menjadikan masyarakat yang mulanya tidak memiliki daya menjadi lebih berdaya dengan adanya kegiatan untuk menciptakan nilai tambah pada ikan. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam hal ini, peran pemerintah untuk melindungi adanya investor yang masuk, karena dikhawatirkan investor akan mengancam keberadaan masyarakat lokal yang mendirikan usaha di Desa Wisata Dieng.

Kegiatan pemetaan partisipatif menunjukkan adanya integrasi antara masyarakat lokal dan ilmu pengetahuan serta aksi top-down dan bottom-up untuk penanggulangan risiko bencana. Pemetaan partisipatif berperan penting dalam bidang kebencanaan secara langsung melibatkan peran masyarakat dalam upaya mengurangi risiko kecelakaan pengunjung. Nilai lebih lainnya adalah bahwa pemetaan partisipatif mampu memadukan seni ilmiah dengan pengetahuan lokal masyarakat beserta pemerintah. Melalui pemetaan partisipatif tersebut, dapat memudahkan para ilmuwan dan ahli kebencanaan untuk mengkaji dan menganalisis secara ilmiah risiko kecelakaan pengunjung di obyek wisata Dataran Tinggi Dieng.

Keselamatan pengelolaan wisata akan selalu terkait dengan upaya-upaya meminalkan risiko dan kecelakaan. Risiko didefinisikan sebagai sumber sumber yang mengandung unsur perusak yang potensial bagi wisatawan, operator atau destinasi, dan komunitas. Elemen-elemen risiko dilihat dari siapa atau apa yang terkena dampak, atau apa yang mengalami kerugian dari setiap keadaan yang mengandung bahaya. Elemen-elemen tersebut termasuk: manusia, lingkungan, fasilitas, infra- struktur, sarana umum, dan ekonomi . Risiko secara umum adalah segala sesuatu yang dapat terjadi pada diri manusia yang tidak diharapkan muncul. Semua kegiatan manusia pada dasarnya akan memiliki risiko meskipun kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai kesenangan. Kecelakaan didefinisikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan cedera, kematian, kerugian, dan kerusakan pada property. Kecelakaan dapat terjadi karena kondisi simultan dari faktor manusia, factor lingkungan, dan faktor alam sendiri

Guidelines for safe recreational water (2003) menyebutkan bahwa pencegahan resiko kecelakaan dapat dilakukan dengan peningkatan keselamatan. Peningkatan keselamatan tersebut dapat diintervensi dengan 5 pendekatan yaitu: 1. Pekerjaan/perekayasaan (engineering); 2. Memperkuat (enforcement); 3. Pendidikan

(education); 4. Tindakan untuk memberanikan (encouragement); dan 5. Kesiapan bahaya (emergency preparedness). Pengelola destinasi wisata yang mengandung risiko tinggi wajib memperhatikan keselamatan pengunjung dengan perencanaan dan pengendalian risiko, seperti diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun, 2009 Pasal 26. Obyek wisata dataran tinggi Dieng merupakan desa wisata yang mengandalkan wisata alam. Petualangan merupakan kegiatan yang sengaja mencari risiko dan ketidakpastian hasil. Konsep dasar keretakan dan kapasitas dapat dikaitkan dengan konsep bahaya. Masyarakat kawasan dataran tinggi Dieng menggambarkan peta zonasi risiko dengan metode partisipatif yang disesuaikan. Pemetaan ini dilakukan dengan membatasi area dengan tingkat aman, berbahaya, dan sangat berbahaya yang disesuaikan dengan hasil FGD yang turut mempertimbangkan pengalaman kejadian masa lalu. Pemetaan partisipatif dapat menjadikan penilaian risiko keamanan pengunjung lebih mudah dipahami oleh masyarakat, lebih efisien karena tidak membutuhkan biaya tinggi, serta lebih berkelanjutan dan dapat diperbarui sesuai dengan perubahan demografi lokal. Berdasarkan peta partisipatif risiko keamanan pengunjung, masyarakat dapat menyimpulkan bahwa masih terdapat beberapa area yang berada di kawasan tingkat sangat berbahaya dan belum diketahui

Pemahaman dasar sebuah perencanaan pengurangan risiko keselamatan pengunjung adalah tentang apa dan siapa yang berada di kawasan risiko dengan keberadaan sumberdaya dan potensi lokal untuk mitigasi bencana. Melalui proses pemetaan bahaya hingga risiko keselamatan pengunjung, masyarakat dapat memahami kebutuhan dasar dalam meminimalisir kecelakaan. Untuk itu, rencana aksi khususnya di tingkat komunitas menjadi penting dalam upaya mengurangi risiko tersebut. Perencanaan ini fokus pada fase kesiapsiagaan dan tanggap darurat yang digambarkan melalui peta zonasi keselamatan pengunjung. Berdasarkan pendekatan yang telah ditempuh, masyarakat secara mandiri dan sadar dapat menentukan strategi meningkatkan kenyamanan pengunjung. Hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif terutama bagi kelompok sadar wisata untuk memahami tingkat bahaya dan kapasitas lokal di obyek wisata keramikan dan kawah nirwana. Persepsi ini kemudian menjadi pedoman pengurangan risiko kecelakaan pengunjung. Implementasi rencana kesiapsiagaan disampaikan melalui dua konsep dasar yaitu : (1) Pengembangan skenario dampak dan kejadian kecelakaan, dan (2) Sistem peringatan dini partisipatif. Peran penting kelompok sadar wisata (Pokdarwis) di obyek wisata keramikan dan kawah nirwana menunjukkan besarnya partisipasi komando dalam mengkoordinasikan sistem kesiapsiagaan. Hal ini terwujud dalam sistem peringatan dini yang dikembangkan dari potensi dan kearifan lokal. Jaminan keselamatan merupakan faktor yang menjadi pertimbangan wisatawan dalam memilih destinasi wisata yang akan dikunjungi. Oleh karena itu, upaya peningkatan keselamatan dianggap sebagai upaya yang sangat tepat dalam menjamin kepuasan wisatawan terhadap destinasi wisata, disamping memberikan perlindungan terhadap risiko dan kecelakaan berwisata merupakan kewajiban pengelola .[7]

Kawasan wisata Dieng juga mampu mengajak partisipasi perangkat desa, pengelola pariwisata dan tokoh masyarakat guna menyusun dan menyepakati jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul sementara bila terjadi kejadian bencana. Berdasarkan pengalaman selama terjadinya kejadian bencana, justru desa dikawasan Dieng ini menjadi tempat yang dipandang relatif aman. Dieng menjadi desa penampung bagi warga desa lainnya ketika desa mereka mengalami kejadian tertentu. Masyarakat setempat telah memiliki kesepakatan untuk jalur dan lokasi penampungan yang diperlukan untuk pengungsian. Beberapa lokasi titik kumpul antara lain terdapat di kantor balai desa, sekolah/madrasah, dan pos polisi. Hasil FGD dengan masyarakat dan pengurus serta perangkat juga menghasilkan kesepakatan untuk menetapkan alternatif titik kumpul lainnya, yaitu di lapangan, di camping ground dekat terminal Aswatama, dan di halaman depan pendopo Soeharto Wietliem. Pengelola pariwisata kawasan Dieng menyepakati diperlukannya signage atau tanda-tanda yang patut dipasang dan ditempatkan pada lokasi yang strategis. Tujuannya agar memudahkan warga dan wisatawan untuk menuju ke lokasi aman. Penanda jalur evakuasi direncanakan dipasang di beberapa perempatan gang di kampung Dieng yang dinilai memiliki kepadatan bangunan dan aktivitas masyarakat.[8]

4. KESIMPULAN

Peran pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam memelihara kelestarian kawasan sehingga diharapkan akan memberi kontribusi bagi penyangga hidup masyarakat dan perekonomian nasional. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai program memegang kunci utama dalam pengembangan pengelolaan kawasan Dieng. Arah kebijakan yang dapat disimpulkan dalam peningkatan peran pemerintah dan masyarakat adalah: pengembangan kawasan berbasis masyarakat, pengembangan Cagar Alam berbasis masyarakat, pengembangan hutan lindung berbasis masyarakat dan pengembangan kawasan Konservasi berbasis masyarakat. Pengelolaan Kawasan Dieng dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, baik instansi pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat. Masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan Dieng. Ragam pesona dan daya tarik wisata di Dataran Tinggi Dieng perlu didukung dengan kesiapsiagaan Kelompok/Organisasi yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan di bidang tanggap darurat. Masyarakat khususnya pengelola pariwisata perlu memiliki pemahaman tentang resiko ancaman bencana disebabkan Dieng Plateau merupakan destinasi pariwisata yang memiliki resiko bencana. Kesepahaman juga dibutuhkan antar pihak guna mengutamakan keselamatan

wisatawan khususnya dan bagi masyarakat di sekitar destinasi pariwisata, termasuk di Dieng agar destinasi wisata ini semakin mampu menerapkan salah satu prinsip dalam pembangunan wisata berkelanjutan.

Dieng sebagai kawasan terpadu diharapkan akan menjadi penyangga ekosistem di wilayah kabupaten Wonosobo, Kendal, Temanggung, Banjarnegara dan Batang, yaitu adanya beberapa daerah yang memiliki kepentingan terhadap kawasan ini. Pedoman dalam pengambilan kebijakan di objek wisata Dieng, yakni: 1. Diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan di destinasi pariwisata Dieng guna memberikan rasa ketenangan kepada wisatawan di kala mereka berwisata. 2. Diperlukan dukungan keamanan dan kenyamanan, termasuk perlunya kelengkapan informasi bagi wisatawan tentang kawasan/lokasi yang rentan bencana di Dieng Plateau, sehingga dapat diantisipasi bila terjadi hal yang tidak diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Wahyudi, "Kajian Kerja Sama Daerah Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Wisata Dataran Dieng," 2010, [Online]. Available: <http://eprints.undip.ac.id/23708/1/WAHYUDI.pdf>.
- [2] H. Fitrianti, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Talun melalui Model Pemberdayaan Masyarakat," *Econ. Dev. Anal. J.*, vol. 3, no. 1, pp. 204–211, 2014.
- [3] S. Aisyah, "Peningkatan Peran Pemerintah Dan Masyarakat Sebagai Upaya Menjaga Ekosistem Dan Konservasi Lingkungan Di Dieng Plateau," *J. Organ. dan Manaj.*, vol. 9, no. 2, pp. 135–144, 2013.
- [4] D. T. Raharjana, "Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata Di Dieng Plateau," *J. Kawistara*, vol. 2, no. 3, pp. 225–237, 2012, doi: 10.22146/kawistara.3935.
- [5] E. Sulistyowati and J. Ekawat, "Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Tangguh Bencana di Area Terdampak Bencana Lumpur Lapindo, Sidoarjo," *Relasi J. Ekon.*, vol. 17, no. 1, pp. 181–201, 2021, doi: 10.31967/relasi.v17i1.417.
- [6] N. P. Y. Anggreswari and A. A. R. Jayaningsih, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Objek Wisata Hidden Canyon Beji Guwang," *J. Ilm. Ilmu Sos.*, vol. 4, no. 1, pp. 30–40, 2018, doi: 10.23887/jiis.v4i1.13952.
- [7] R. C. Wibowo, K. H. Basuki, and ..., "Pemetaan Zonasi Risiko Partisipatif Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Kawasan Obyek Wisata Keramikan dan Kawah Nirwana Desa Sukamarga," *J. Sakai ...*, 2020, [Online]. Available: <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/25093>.
- [8] D. T. Raharjana, M. Yusuf, and A. Retnowati, "Penguatan Kapasitas Pokdarwis untuk Pengurangan Risiko Bencana di Destinasi Pariwisata Dieng," *Bakti Budaya*, vol. 3, no. 2, p. 132, 2020, doi: 10.22146/bb.60957.